



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

LAPORAN MONITORING EVALUASI *2026*



TRIWULAN I

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum.....	2
3. Maksud dan Tujuan	2
4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II RENCANA KERJA TAHUN 2026.....	4
1. Rencana Kerja	4
2. Perjanjian Kinerja	5
BAB III MONITORING DAN EVALUASI.....	8
A. Realisasi Pencapaian Perjanjian Kinerja	9
1. IKU 1.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB....	10
2. IKU 1.2 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	15
B. Realisasi Anggaran	24
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2026	24
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2026	29
3. Pendapatan TA. 2026.....	30
C. Efisiensi Penggunaan Anggaran	31
1. Efisiensi APBD TA. 2026	33
BAB IV PENUTUP.....	35

L A M P I R A N

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kerja Tahun 2026	4
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026.....	8
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indikator Utama Triwulan I Tahun 2026	9
Tabel 3.3	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan).....	10
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	13
Tabel 3.5	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)	15
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	18
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	20
Tabel 3.8	Hasil Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan Kadaluaarsa	21
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Triwulan I APBD TA. 2026	25
Tabel 3.10	Rincian Realisasi Anggaran Triwulan I APBN TA. 2026	26
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Triwulan I APBN TA. 2026.....	30
Tabel 3.12	Capaian Pendapatan Triwulan I TA 2026	31
Tabel 3.13	Keterkaitan Rasio Efisiensi dan Tingkat Efisiensi Anggaran	33
Tabel 3.14	Efisiensi Penggunaan APBD Triwulan I TA. 2026.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan beserta indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan rencana kinerja akan memudahkan dalam mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun dengan melakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja utama.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu disusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi sebagai salah satu dokumen pengukuran kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi pencapaian kinerja diperlukan dalam proses perencanaan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga semua program dan kegiatan pendukung pencapaian kinerja dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta dapat mendukung tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.

2. DASAR HUKUM

Dasar penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2026 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi pencapaian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Untuk mengetahui realisasi sasaran strategis pada program/kegiatan sesuai dengan indikator kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengetahui masalah/kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan;

- d. Sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam memberikan solusi untuk perbaikan pencapaian sasaran strategis pada program/kegiatan.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja.

BAB II. RENCANA KERJA TAHUN 2026

Dalam Bab ini diuraikan rencana kerja tahun 2026 yang merupakan perjabaran dari Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

BAB II. MONITORING DAN EVALUASI

Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam realisasi sasaran strategis pada program/kegiatan sesuai dengan indikator kinerja dan anggaran.

BAB III. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

RENCANA KERJA TAHUN 2026

1. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan kontribusi IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,48	1,55	Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2.	Terjaganya distribusi barang, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi dalam perdagangan serta meningkatnya kepastian standar mutu barang dan jasa yang beredar	2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,55	14,05			

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan kontribusi IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	1. Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,48	1,55	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Terjaganya distribusi barang, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi dalam perdagangan serta meningkatnya kepastian standar mutu barang dan jasa yang beredar	1. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,55	14,05	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Target
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	Rp. 28.426.643.240,-	Realisasi minimal 85%
	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12.676.499.740,-	Realisasi minimal 90%
	2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 174.890.140,-	Realisasi minimal 85%
	3. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 149.975.000,-	Realisasi minimal 85%
	4. Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 15.425.278.360,-	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	Rp. 338.330.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan	Rp. 28.764.973.240,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
a.	Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
	1.	Rp. -	
b.	Program Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	1.	Rp. -	
	Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan	Rp. -	-

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 60% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember tahun 2026;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 22 Januari 2026, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2026;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2026;

- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);**
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;**
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:**
- 1. TL rekomendasi Tahun 2026: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**
 - 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2026: Administrasi 100%, Keuangan 80%;**
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;**
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar serta surat manual yang diupload) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;**
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);**
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.**

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berdasarkan hasil pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Dalam penilaian keberhasilan dan ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan didasarkan pada pengelompokan kategori sesuai predikat nilai dalam skala pengukuran sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026

Adapun penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
	$X < 55\%$	Belum Berhasil

A. Realisasi Pencapaian Perjanjian Kinerja

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Utama Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2025	Target 2026	Triwulan I Tahun 2026	
						Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan kontribusi IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,48	1,55	1,56	100
2.	Terjaganya distribusi barang, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi dalam perdagangan serta meningkatnya kepastian standar mutu barang dan jasa yang beredar	1. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	13,55	14,05	13,37	95,18
R A T A – R A T A C A P A I A N							97,82

Dari tabel di atas maka capaian kinerja Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai **97,82%** sehingga masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Adapun hasil perhitungan indikator kinerja utama untuk mengetahui tingkat pencapaian terhadap target adalah sebagai berikut:

1. IKU 1.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
		Triwulan I 2026
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.735
2	Pertambangan dan Penggalian	396,5
3	Industri Pengolahan	589,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	40,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,1
6	Konstruksi	3.435,2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.065,6
8	Transportasi dan Pergudangan	1.742,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296,9
10	Informasi dan Komunikasi	2.559,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.651,8
12	Real Estate	981,2
13	Jasa Perusahaan	58,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.306,7
15	Jasa Pendidikan	3.356,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.007,9
17	Jasa lainnya	635,1
	Total PDRB	37.880,3

Sumber Data: PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2026

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 589,8 Miliar atau sebesar 1,56 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 37.880,3 Miliar sehingga realisasi capaian kinerja triwulan I telah melebihi target, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke satu, sehingga persentase capaiannya tetap dihitung sebesar 100 persen.

1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Upaya Penguatan

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor pendukung, faktor penghambat, serta langkah solusi yang dapat dilakukan:

➤ Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTT antara lain:

1. Ketersediaan Bahan Baku Lokal

NTT memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat menjadi bahan baku utama bagi industri pengolahan. Ketersediaan bahan baku ini menjadi modal penting dalam meningkatkan aktivitas produksi.

2. Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT secara berkelanjutan memberikan fasilitasi, pendampingan, serta pembinaan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

3. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk IKM

Upaya peningkatan nilai tambah produk melalui berbagai program seperti pelatihan, pameran, dan sertifikasi produk turut mendorong daya saing industri lokal sehingga mampu menembus pasar yang lebih luas.

➤ Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menghambat peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTT antara lain:

1. Kapasitas SDM dan Teknologi yang Masih Terbatas

Masih terbatasnya kemampuan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk.

2. Kualitas dan Konsistensi Produk

Variasi mutu produk yang belum stabil menyebabkan daya saing produk industri lokal sulit menembus pasar yang lebih luas.

3. Akses Pasar dan Promosi yang Terbatas

Minimnya kegiatan promosi dan jaringan pemasaran, baik di tingkat lokal maupun nasional, menghambat peningkatan volume penjualan produk.

➤ **Upaya yang dapat dilakukan**

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, berbagai upaya telah dirumuskan guna mendorong efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan di daerah. Adapun langkah-langkah yang menjadi fokus penguatan disampaikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM dan Teknologi

Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas produksi IKM.

2. Peningkatan Mutu dan Standardisasi Produk

Melakukan pendampingan sertifikasi, pengembangan desain produk, dan perbaikan kemasan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

3. Penguatan Jejaring Kemitraan

Menjalin kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha besar, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperluas jaringan usaha.

4. Peningkatan Branding dan Akses Pasar Produk Lokal

Mengembangkan identitas produk daerah melalui promosi terpadu serta partisipasi pada berbagai pameran tingkat daerah dan nasional guna meningkatkan visibilitas dan pengenalan produk industri lokal.

1.2 Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB memerlukan dukungan program yang dirancang secara tepat dan berkelanjutan. Program-program tersebut tidak hanya berfungsi memperkuat kapasitas pelaku industri, tetapi juga mendorong terciptanya nilai tambah dan penguatan daya saing. Melalui intervensi yang terarah, pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dapat memastikan bahwa perkembangan industri pengolahan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, bagian berikut menguraikan program-program yang mendukung kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan kontribusi IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	6,11%	Dihitung diakhir periode	Belum dapat dihitung

Indikator kinerja program di atas pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 6,11%. Namun, realisasi pada Triwulan I belum dapat ditentukan karena perhitungan indikator tersebut dilakukan pada akhir tahun 2026. Mekanisme ini dinilai lebih ideal untuk menggambarkan pertumbuhan sektor industri pengolahan secara menyeluruh dalam satu periode tahun berjalan.

Dalam upaya mendukung peningkatan pertumbuhan sektor industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri:

Pada sub kegiatan ini dilakukan beberapa aktivitas pendukung antara lain:

1. Rumah Kemasan
2. Dekranasda
3. NTT Mart
4. Pelatihan Tenun Pewarna Alam
5. Dapur Flobamorata Bali dan Jakarta
6. Misi Dagang

Dari aktivitas di atas tersebut, hanya NTT Mart di 22 Kota/Kabupaten yang telah dilaksanakan di Triwulan 1 dan aktivitas yang lain belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I ini dikarenakan beberapa kendala teknis dan administratif sehingga akan dijadwalkan pada Triwulan berikutnya.

❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri:

Pada sub kegiatan ini dilakukan beberapa aktivitas pendukung antara lain:

1. Bimtek Pengolahan Kacang Tanah
2. Bimtek Pengolahan Pisang
3. Festival IKM
4. Malam IKM/UMKM

Aktivitas tersebut juga belum dapat dilaksanakan pada Triwulan I ini dikarenakan beberapa kendala teknis dan administratif sehingga akan dijadwalkan pada Triwulan berikutnya.

2. **IKU 1.2 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
		Triwulan I 2026
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.735
2	Pertambangan dan Penggalan	396,5
3	Industri Pengolahan	589,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	40,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,1
6	Konstruksi	3.435,2
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.065,6
8	Transportasi dan Pergudangan	1.742,6
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296,9
10	Informasi dan Komunikasi	2.559,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.651,8
12	Real Estate	981,2
13	Jasa Perusahaan	58,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.306,7
15	Jasa Pendidikan	3.356,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.007,9
17	Jasa lainnya	635,1
	Total PDRB	37.880,3

Sumber Data: PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2026

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 5.065,6 Miliar atau sebesar 13,37 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 37.880,3 Miliar sehingga realisasi belum mencapai target yang ditetapkan sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke dua, sehingga persentase capaiannya dihitung sebesar 97,82 persen.

4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Upaya Penguatan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor pendukung, faktor penghambat, serta langkah solusi yang dapat dilakukan:

➤ **Faktor Pendukung**

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan kontribusi sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTT antara lain:

1. Monitoring dan Pengendalian Harga serta Stok Barang Kebutuhan Pokok

Kegiatan pemantauan dan pengendalian harga dan stok membantu menjaga stabilitas ketersediaan komoditas penting, sehingga perdagangan berjalan lancar tanpa gangguan.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Barang Beredar

Pengendalian terhadap barang beredar dan jasa memastikan perdagangan berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai standar, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

3. Koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Lembaga Terkait

Sinergi lintas sektor memperkuat rantai pasok barang dan meningkatkan efisiensi distribusi antarwilayah di NTT.

4. Penguatan Pemasaran, Promosi, dan Standardisasi Produk

Memperluas jangkauan pasar melalui promosi digital dan pameran untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap PDRB.

5. Pelatihan dan Pendampingan Digital Marketing

Program penguatan kapasitas pelaku usaha dalam penggunaan media sosial, fotografi produk, dan manajemen toko online menjadi faktor penting dalam meningkatkan penjualan.

➤ **Faktor Penghambat**

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang muncul dalam proses distribusi, pemasaran, dan aktivitas pelaku usaha. Untuk memahami kondisi yang membatasi kinerjanya, berikut disampaikan faktor-faktor penghambat yang memengaruhi perkembangan sektor perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Akses Internet dan Teknologi yang Belum Merata

Pemasaran digital dan pemanfaatan marketplace sering terhambat oleh kualitas jaringan internet yang belum optimal di sejumlah daerah.

2. Kapasitas Pelaku Usaha yang Masih Rendah

Banyak pelaku UMKM/IKM belum memiliki kemampuan manajemen usaha, pemasaran digital, serta pemenuhan standar mutu produk yang memadai untuk bersaing.

3. Pengawasan Barang Beredar yang Belum Merata

Penyebaran produk yang tidak memenuhi standar mutu atau tidak memiliki legalitas dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan mengganggu iklim perdagangan.

4. Fluktuasi Harga Komoditas Strategis

Perubahan harga bahan pokok atau komoditas unggulan dapat mengganggu kelancaran perdagangan dan berdampak pada nilai kontribusi sektor perdagangan.

➤ **Upaya yang dapat dilakukan**

Memperhatikan berbagai kendala yang memengaruhi perkembangan sektor perdagangan, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat kinerja dan mendorong peningkatan kontribusinya terhadap PDRB. Berikut sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung penguatan sektor perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha

Memberikan bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, serta peningkatan kapasitas manajerial dan pemasaran bagi pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen

Melaksanakan pengawasan rutin terhadap barang beredar untuk memastikan mutu, keamanan, dan kepatuhan standar, sehingga menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan terpercaya.

3. **Monitoring dan Pengendalian Harga serta Stok Kebutuhan Pokok**
Melakukan pemantauan harga secara berkala, mengontrol ketersediaan komoditas strategis, serta koordinasi dengan pelaku distribusi untuk menjaga stabilitas pasokan.
4. **Fasilitasi Pemasaran Produk Lokal, Termasuk Pemasaran Digital**
Mendorong promosi produk daerah melalui pameran, katalog digital, pelatihan pemasaran online, *onboarding marketplace*, serta kampanye bangga produk lokal.

2.2 Program yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, diperlukan program-program yang mampu memperkuat aktivitas distribusi, pemasaran, serta kapasitas pelaku usaha. Program yang dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT berperan penting dalam menciptakan iklim perdagangan yang lebih produktif, terarah, dan berdaya saing. Berikut program-program yang mendukung penguatan kontribusi sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi daerah:

a) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Terjaganya distribusi barang, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi dalam perdagangan serta meningkatnya kepastian standar mutu barang dan jasa yang beredar	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2,5±1%	Dihitung diakhir periode	Belum dapat dihitung

Indikator Persentase rata-rata kenaikan harga barang pokok pada tahun 2026 ditargetkan pada kisaran 2,5±1%. Namun, realisasi pada Triwulan I belum dapat ditentukan karena perhitungan indikator tersebut dilakukan pada akhir tahun 2026. Mekanisme ini dinilai lebih tepat dilakukan pada

akhir tahun karena diperlukan data harga yang lengkap dan stabil sepanjang satu periode. Fluktuasi harga yang terjadi setiap bulan dapat bersifat sementara, sehingga penghitungan di tengah tahun belum mampu menggambarkan kondisi stabilitas harga barang pokok secara menyeluruh. Dengan menunggu hingga seluruh data tahunan tersedia, hasil perhitungan menjadi lebih akurat, representatif, dan mencerminkan tren harga yang sebenarnya selama satu tahun penuh.

Dalam upaya mendukung peningkatan sektor perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

i. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

❖ Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi:

Pada sub kegiatan ini terdapat aktivitas pendukung yaitu:

1. Pengambilan Data Harga

Pengambilan data harga barang kebutuhan pokok pada pasar tradisional merupakan proses pencatatan dan pemantauan harga berbagai komoditas penting yang dijual oleh pedagang di pasar rakyat. Kegiatan ini dilakukan secara rutin untuk memperoleh informasi harga yang akurat dan terkini. Data yang dihimpun mencakup harga eceran sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, sayuran, serta komoditas strategis lainnya. Hasil pengumpulan data tersebut digunakan untuk memantau kenaikan atau penurunan harga sebagai salah satu deteksi dini gejala inflasi.

Aktivitas ini dilakukan pada 3 pasar di Kota Kupang yaitu, Pasar Naikoten, Oebobo, dan Oeba.

b) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian Triwulan I
Terjaganya distribusi barang, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi dalam perdagangan serta meningkatnya kepastian standar mutu barang dan jasa yang beredar	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100%	42,31	42,31

Indikator program ini menunjukkan seberapa banyak pelaku usaha yang patuh dalam menjual produk yang aman dan layak bagi masyarakat. Hal ini menggambarkan peningkatan kepatuhan terhadap aturan seperti label yang benar, kejelasan komposisi, batas kedaluwarsa, izin edar, hingga kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen lainnya. Semakin tinggi persentase peningkatannya, semakin baik kualitas pelayanan pelaku usaha dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah.

Berikut kegiatan yang mendukung terlaksananya Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen:

i. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- ❖ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga:

Pada sub kegiatan ini terdapat aktivitas pendukung yaitu:

1. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan Kadaluarsa

Aktivitas ini merupakan upaya untuk memastikan produk yang beredar di pasaran tetap aman dikonsumsi masyarakat. Adapun pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui inspeksi ke toko, kios maupun mini market untuk memeriksa tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan, serta izin edar produk. Melalui pengawasan ini, pemerintah dapat mencegah peredaran barang berbahaya, melindungi kesehatan konsumen, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab dalam menyediakan produk yang aman dan berkualitas. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan di 6 Kota/Kabupaten yaitu Kota Kupang, Kab. Malaka, TTU, TTS, Rote Ndao, Belu. Pada Triwulan I ini telah terlaksana kegiatan pengawasan di Kota Kupang dan Kab. TTU di bulan Maret dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan Kadaluarsa

No	Lokasi	Jumlah Pelaku Usaha	Sesuai Standar	Terdapat Temuan
1	Kab. TTS	13	2	11
2	Kab. Belu	13	9	4
Total :		26	11	15

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari total 26 pelaku usaha yang dilakukan pemeriksaan di lokasi terdapat 15 pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat 1 (g) dan (i) Pasal 2 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu memperdagangkan barang makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa / rusak, cacat dan tidak layak untuk dikonsumsi.

Terhadap barang temuan, petugas melakukan pengamanan (sita) ditempat dan memberi pembinaan serta

edukasi kepada pelaku usaha agar kedepan selalu memperhatikan kondisi setiap produk yang diperdagangkannya sehingga tidak merugikan dan membahayakan konsumen.

ii. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk diSeluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

❖ Pengembangan Layanan Kalibrasi:

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB). Layanan kalibrasi merupakan pelayanan untuk memastikan alat ukur yang digunakan dalam aktivitas perdagangan berfungsi tepat dan memberikan hasil pengukuran yang akurat dan sesuai standar resmi. Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat memastikan bahwa timbangan, alat ukur volume, maupun instrumen lainnya berfungsi dengan benar sehingga transaksi perdagangan berlangsung jujur dan terpercaya. Layanan kalibrasi juga mendukung perlindungan konsumen serta meningkatkan kualitas pelayanan usaha di berbagai sektor.

Layanan kalibrasi akan dilaksanakan di Kabupaten Kab. TTU, untuk memastikan alat yang digunakan UPTD PSMB dalam layanan kalibrasi sudah memenuhi standar maka alat-alat tersebut akan terlebih dahulu dikalibrasi pada UPT Balai Kalibrasi Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan di Jakarta.

Namun pada Triwulan I ini belum dapat direalisasikan dikarenakan beberapa kendala teknis dan administratif sehingga akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

❖ **Pengembangan Layanan Pengujian:**

Sub Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB). Pada layanan pengujian terdapat beberapa aktivitas sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan laboratorium untuk menunjang kinerja UPTD PSMB;
2. Pelatihan ISO 17025 untuk proses akreditasi UPTD PSMB;
3. Pengambilan Sampel/Contoh di Kab. Ngada;
4. Diklat Pengembangan SDM di Jakarta;
5. Diklat Pengujian Mutu Komoditi di Jakarta;
6. Diklat Kalibrasi di Jakarta;
7. Diklat Ketidakpastian Pengukuran di Jakarta;
8. Diklat Sistem Manajemen Mutu di Jakarta.

Namun pada Triwulan I ini belum dapat direalisasikan seluruhnya dikarenakan beberapa kendala teknis dan administratif sehingga akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

2) Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi

Dari realisasi kinerja yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dijabarkan beberapa faktor pendukung, penghambat maupun solusi untuk permasalahan yang ditemukan dalam mencapai target kinerja yaitu sebagai berikut:

⇒ **Faktor Pendukung:**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berusaha dalam meningkatkan kinerja antara lain:

- a. Ketersediaan sumber daya baik alam maupun tenaga kerja potensial;
- b. Kerja sama dan kolaborasi dengan dinas/unit teknis terkait untuk mengalokasikan dan menganggarkan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas produk dan pelaku usaha;
- c. Adanya bantuan fasilitasi pengurusan perijinan usaha industri yang dapat mendukung tumbuhnya industri yang legal;
- d. Tersedianya akses pemasaran produk secara *online* maupun *offline* sehingga mendukung terciptanya peluang kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

⇒ **Faktor Penghambat:**

- a. Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;
- b. Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Adanya inflasi atau deflasi karena adanya kenaikan atau penurunan harga barang pada waktu tertentu.

⇒ **Solusi/Rekomendasi:**

- a. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis baik bagi tenaga industri dan perdagangan maupun pelaku usaha;
- b. Fasilitasi pengembangan akses pasar dengan memanfaatkan berbagai jenis platform penjualan baik secara *online* maupun *offline*;
- c. Meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama, dan pengawasan terhadap eksportir;
- d. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang bertujuan untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2026

Realisasi anggaran program/kegiatan yang bersumber pada APBD Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Triwulan I APBD TA. 2026

No	Program	Pagu (Rp)	Triwulan I	
			Keuangan	
			Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	SEKRETARIAT			
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.986.623.847,-	2.444.025.689,-	18,82
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	75.000.000,-	0,-	0
3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	149.975.000,-	9.990.000,-	6,66
4.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	15.834.467.493,-	2.786.754.011,-	17,60
	Total :	29.046.066.340,-	5.240.769.700,-	18,04

Tabel 3.10 Rincian Realisasi Anggaran Triwulan I APBD TA. 2026

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
				(Rp)	(%)	
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2026			29.046.066.340	5.240.769.700	18,05	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		12.986.623.847	2.444.025.689	18,82%	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.223.460	0	0	
		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.434.460	0	0
		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.789.000	0	0
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.781.719.077	2.347.177.720	19,92	
		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.747.258.977	2.346.377.720	19,97
		2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	34.460.100	800.000	2,32
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.748.500	0	0	
		3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.748.500	0	0
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.424.700	29.566.059	9,91%	
		4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.020.100	1.093.100	5,75
		4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.478.700	8.094.200	46,31
		4.3	Penyediaan Bahan/Material	45.816.500	9.779.393	21,34
		4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.430.000	9.415.366	33,12
		4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.679.400	1.184.000	0,63
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.938.000	4.750.000	34,08		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	(%)
	5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.938.000	4.750.000	34,08
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		659.372.650	39.071.000	5,93
	6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	140.000	4,44
	6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.315.650	18.452.400	5,60
	6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	326.907.000	20.478.600	6,26
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		170.197.460	23.460.910	13,78
	7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.740.000	15.746.460	37,73
	7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.900.000	610.000	1,57
	7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.681.000	4.573.000	11,52
	7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.876.460	2.531.450	5,08
II	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		75.000.000	0	0
	1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	75.000.000	0	0
	1.1	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kab/Kota dalam 1 Provinsi	75.000.000	0	0

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	(%)
III	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		149.975.000	9.990.000	6,66
	1	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota	99.975.000	650.000	0,65
	1.1	Pengembangan Layanan Kalibrasi	19.501.000	0	0
	1.2	Pengembangan Layanan Pengujian	80.474.000	650.000	0,65
	2	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	9.340.000	18,68
	2.1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	50.000.000	9.340.000	18,68
IV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		15.834.467.493	2.786.754.011	17,60
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	15.834.467.493	2.786.754.011	17,60
	1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	11.040.150.179	2.783.993.011	25,22
	1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.794.317.314	2.761.000	0,06

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang bersumber dari APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 yaitu sebesar **Rp. 5.240.769.700,00** atau **18,04%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 29.046.066.340,00**. Realisasi yang ada bersumber dari kegiatan penunjang/rutin kantor, sedangkan untuk program/kegiatan belum ada realisasi.

Capaian realisasi anggaran pada Triwulan I ini sangat kecil dikarenakan program/kegiatan yang direncanakan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya beberapa kendala teknis dan administratif, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terdapat program/kegiatan yang harus mengalami penyesuaian akibat kebijakan refocusing sesuai prioritas pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan capaian kinerja maka diharapkan seluruh penanggung jawab kegiatan dan pihak terkait dapat meningkatkan komitmen serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatan, sehingga capaian kinerja pada triwulan berikutnya dapat lebih optimal.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2026

Realisasi anggaran program/kegiatan yang bersumber pada APBN Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Triwulan I APBN TA. 2026

No	Program	Pagu (Rp)	Triwulan I	
			Keuangan	
			Reliasasi (Rp)	Capaian (%)
1	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	0,-	0	0
2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	0,-	0	0
3	Perdagangan Luar Negeri	0,-	0	0
	Total:	0,-	0	0

Pada periode pelaporan ini, tidak terdapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN. Namun diharapkan masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk melakukan koordinasi kepada Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan apabila ada perubahan kebijakan.

3) Pendapatan TA. 2026

Capaian Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Capaian Pendapatan Triwulan I TA. 2026

No	Program		Target (Rp)	Triwulan I	
				Reliasasi (Rp)	Capaian (%)
TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2026			338.330.000,-	20.750.000,-	6,13
1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan		37.330.000,-	0,-	0
	a.	Sewa Aula Dekranasda	10.000.000,-	0,-	0
	b.	Sewa Pantri Dekranasda	27.330.000,-	0,-	0
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		121.000.000,-	20.750.000,-	17,15
	a.	Sewa Rumah Dinas	28.800.000,-	1.800.000,-	6,25
	b.	Layanan Kalibrasi	92.200.000,-	18.950.000,-	20,55
3	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah		0,-	6.000,-	0
4	Lain-lain PAD yang Sah		180.000.000,00	0,-	0
	a	Jasa desain dan cetak kemasan	25.000.000,-	0,-	0
	b	Retribusi Penjualan Produk Dekranasda	55.000.000,-	0,-	0
	c	Retribusi Penjualan Garam	100.000.000,-	0,-	0

Pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT pada Triwulan I Tahun 2026 telah mencapai **20.750.000,00** atau **6,13%** dari target sebesar **Rp. 338.330.000,00** di mana pendapatan terbesar diperoleh dari Layanan Kalibrasi.

C. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara besaran anggaran yang dialokasikan dengan realisasi penggunaannya pada setiap program dan kegiatan.

Tingkat efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai sasaran dengan penggunaan anggaran yang hemat, tanpa mengurangi kualitas keluaran (*output*) yang dihasilkan. Sebaliknya, tingkat efisiensi yang rendah atau nilai realisasi yang melebihi pagu anggaran menunjukkan adanya potensi ketidakefisienan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pengendalian keuangan di periode berikutnya.

Secara umum, hasil pengukuran efisiensi anggaran digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program telah sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan akuntabel.

1. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menunjukkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Nilai rasio ini menggambarkan **tingkat penyerapan anggaran**.

Semakin tinggi nilai rasio (mendekati 100%), berarti penggunaan anggaran semakin optimal. Namun jika rasio melebihi 100%, berarti terjadi kelebihan realisasi (*overbudget*).

2. Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi menunjukkan persentase selisih antara anggaran dan realisasi anggaran terhadap total anggaran yang tersedia, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran} - \text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi digunakan untuk menilai **tingkat penghematan atau optimalisasi penggunaan anggaran**. Semakin kecil persentasenya, semakin efisien penggunaan anggaran tersebut.

Hubungan rasio efisiensi dan tingkat efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Keterkaitan Rasio Efisiensi dan Tingkat Efisiensi Anggaran

Rasio Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori	Keterangan
$\geq 90\% - 100\%$	$\leq 10\%$	Sangat Efisien	Realisasi anggaran sangat optimal; selisih kecil antara anggaran dan realisasi
$75\% - < 90\%$	$> 10\% - 25\%$	Efisien	Penggunaan anggaran efektif dan hemat; kegiatan terlaksana baik
$60\% - < 75\%$	$> 25\% - 40\%$	Cukup Efisien	Ada penghematan cukup besar, namun kegiatan tetap tercapai.
$50\% - < 60\%$	$> 40\% - 50\%$	Kurang Efisien	Penyerapan anggaran rendah; pelaksanaan kegiatan belum optimal
$< 50\%$	$> 50\%$	Belum Efisien	Anggaran sebagian besar tidak terserap; kegiatan tidak terlaksana optimal
$> 100\%$	-	Tidak Efisien (Overbudget)	Realisasi melebihi anggaran yang ditetapkan.

Pelaksanaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja prioritas melalui pemanfaatan dana secara tepat sasaran, hemat, dan terkendali. Upaya efisiensi dilakukan dengan menyesuaikan kegiatan pada skala prioritas, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta menekan pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah terhadap capaian program.

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1) Efisiensi APBD TA. 2026

Berikut tingkat efisiensi anggaran APBD TA. 2026:

Tabel 3.14 Efisiensi Penggunaan APBD Triwulan I TA. 2026

No	Program	Pagu (Rp)	Triwulan I				
			Reliasasi (Rp)	Selisih (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Ketagori Efisiensi
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.986.623.847	2.444.025.689	10.542.598.158	18,82	81,82	Belum Efisien
2.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	75.000.000	0	0	0	100	Belum Efisien
3.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	149.975.000	9.990.000	139.985.000	6,66	93,34	Belum Efisien
4.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	15.834.467.493	2.786.754.011	13.047.713.482	17,60	82,40	Belum Efisien
	Total :	29.046.066.340	5.240.769.700	23.805.296.640	18,04	81,96	Belum Efisien

Berdasarkan data pada Tabel 3.14, realisasi penggunaan anggaran pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar program belum dapat direalisasikan secara optimal. Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 29.046.066.340, realisasi anggaran baru mencapai Rp. 5.240.769.700 atau sekitar 18,04%, dengan tingkat efisiensi sebesar 81,96%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa serapan anggaran pada triwulan pertama masih tergolong rendah dan berada pada kategori belum efisien. Rendahnya serapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Proses administrasi dan penetapan kegiatan yang masih berjalan pada awal tahun anggaran, termasuk penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penyesuaian program/kegiatan prioritas untuk mendukung Dasa Cita Gubernur NTT;
2. Kegiatan umumnya dilaksanakan pada triwulan II dan III, setelah persiapan teknis dan koordinasi dengan pihak terkait selesai dilakukan;
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan pada triwulan pertama yang bertepatan dengan masa transisi tahun anggaran sebelumnya, sehingga sebagian kegiatan belum dapat dijalankan sesuai rencana kerja tahunan.

Meskipun demikian, rendahnya realisasi pada triwulan I bersifat temporer, karena sebagian besar kegiatan telah dijadwalkan untuk direalisasikan pada triwulan berikutnya. Dengan adanya percepatan proses administrasi, penyesuaian jadwal kegiatan, dan peningkatan koordinasi, diharapkan tingkat penyerapan anggaran pada triwulan II dan III dapat meningkat secara signifikan sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat lebih optimal pada akhir tahun anggaran.

BAB IV

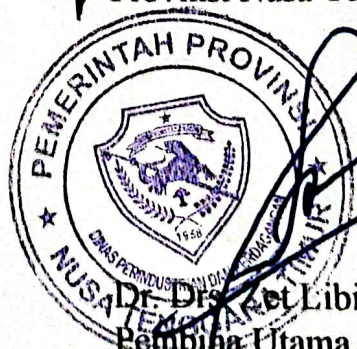
PENUTUP

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT diharapkan menjadi Pedoman untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Industri dan Perdagangan, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2026 disusun dengan harapan dapat menjadi proyeksi di tahun selanjutnya dengan harapan capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT mampu memberikan kontribusi mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Nusa Tenggara Timur.

Kupang, April 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, ✓



Dr. Drs. Ket Libing, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680713 198903 1 009

LAMPIRAN

Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Per Triwulan Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi 2025	Target 2026	Realisasi 2026					Capaian 2026*				
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun
1	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah serta penguatan kontribusi IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,48	1,55	1,56	0	0	0	1,56	100	0	0	0	100
2	Terjaganya distribusi barang, stabilitas harga, dan pemanfaatan teknologi dalam perdagangan serta meningkatnya kepastian standar mutu barang dan jasa yang beredar	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,55	14,05	13,37	0	0	0	13,37	95,18	0	0	0	95,18
Rata-rata					7,46	0	0	0	7,46	97,82	0	0	0	97,82

Keterangan:

*) Apabila hasil perhitungan capaian di atas 100% maka tetap dihitung 100%

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	
Perencana Ahli Pertama	

Kupang, April 2026
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dr. Drs. Zetubing, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680713 198903 1 009

Realisasi Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Triwulan I Tahun 2026

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi 2026					Capaian 2026				
		2026	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
	APBD	29.046.066.340	5.240.769.700	-	-	-	5.240.769.700	18,04	0	0	0	18,04
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.986.623.847	2.444.025.689	-	-	-	2.444.025.689	18,82	0	0	0	18,82
2	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	75.000.000	-	-	-	-	0	0,00	0	0	0	0,00
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	149.975.000	9.990.000	-	-	-	9.990.000	6,66	0	0	0	6,66
4	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	15.834.467.493	2.786.754.011	-	-	-	2.786.754.011	17,60	0	0	0	17,60
	Pendapatan	338.330.000	20.756.000	0	0	0	20.756.000	6,13	0	0	0	6,13
1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan	37.330.000	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	Sewa Aula Dekranasda	10.000.000	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	Sewa Pantri Dekranasda	27.330.000	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	121.000.000	20.750.000	-	-	-	20.750.000	17,15	-	-	-	17,15
	Sewa Rumah Dinas	28.800.000	1.800.000	-	-	-	1.800.000	6,25	-	-	-	6,25
	Jasa Pengujian/Kalibrasi	92.200.000	18.950.000	-	-	-	18.950.000	20,55	-	-	-	20,55
3	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	-	6.000	-	-	-	6.000	100	-	-	-	100
4	Lain-lain PAD yang Sah	180.000.000	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	Jasa desain dan cetak kemasan	25.000.000	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	Retribusi Penjualan Produk Dekranasda	55.000.000	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	Retribusi Penjualan Garam	100.000.000	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0

Kupang, April 2026
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dr. Drs. Zetubing, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19560713 198903 1 009

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubag Keuangan	
Perencana Ahli Pertama	